

## **Kebijakan Pengembangan Sektor Basis Sebagai Faktor Pendorong Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Morowali**

**Armawati<sup>1)</sup>, Tovan<sup>2)</sup>, Agung Budi Winoto<sup>3)</sup>, Arson abd. Rasyid Nunu<sup>4)</sup>**

<sup>1),2),3),4)</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Tadulako, Palu

*email Korespondensi: tovanxx@gmail.com*



©2018 –Bongaya Journal of Research in Management STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/> ).

**Abstract:** *This study aims to determine and analyze the economic development planning policy in Morowali Regency and the importance of developing the base sector in implementing economic development in Morowali Regency. Based on secondary data that is described systematically using the location quotient (LQ) model method. The results of the study indicate that the economy of Morowali Regency has a base sector (has a comparative advantage) in 8 sectors/sub-sectors. The most potential base sectors are the sectors/sub-sectors in the primary sector, the agricultural sector which specializes in the sub-sector, plantations, forestry, fisheries and the mining/excavation sector which specializes in the oil and gas mining sub-sector. From the results of considering the priority of the base sector through LQ, the agricultural, plantation, fisheries, forestry and mining base sectors are recommended to receive top priority in the economic development policy of Morowali Regency. Based on policy analysis, the economic development strategy of Morowali Regency is to utilize the market share of agricultural commodities, especially plantations and fisheries through a network of cooperation between local governments, private sector, NGOs and communities at local, regional, national and international levels in the fields of economics and trade in order to increase production, productivity and export volume.*

**Keywords:** *Base Sector & Economic Development*

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Morowali serta pentingnya pengembangan sektor basis dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Morowali. Dengan didasarkan pada data sekunder yang dideskripsikan secara sistematis menggunakan metode model location quotien (LQ). Hasil penelitian menunjukan bahwa perekonomian Kabupaten Morowali mempunyai sektor basis (memiliki keunggulan komparatif) pada 8 sektor/sub sektor. Sektor basis yang paling potensial adalah sektor/sub sektor yang berada pada sektor primer, sektor pertanian yang terspesialisasi pada sub sektor, perkebunan, kehutanan, perikanan dan sektor pertambangan/penggalian yang terspesialisasi pada sub sektor pertambangan migas dan gas bumi. Dari hasil pertimbangan prioritas sektor basis melalui LQ, maka sektor basis pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan pertambangan direkomendasikan untuk mendapat prioritas utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Morowali. Berdasarkan analisa kebijakan, maka strategi pembangunan ekonomi Kabupaten Morowali adalah memanfaatkan pangsa pasar komoditas pertanian khususnya perkebunan dan perikanan melalui jaringan kerja sama antar pemerintah daerah, swasta, LSM dan masyarakat baik pada tatanan lokal, regional, nasional maupun internasional di bidang ekonomi dan perdagangan dalam rangka meningkatkan produksi, produktivitas dan volume ekspor.

**Kata Kunci:** Sektor Basis & Pembangunan Ekonomi

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan atau dilaksanakan dalam suatu Wilayah atau Daerah. Tanpa pembangunan ekonomi masyarakat akan sulit untuk mendapatkan kemakmuran. Namun hal itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Perencanaan yang matang serta realisasi yang baik akan memudahkan kita untuk mencapainya. Pelaksanaan pembangunan ekonomi disuatu daerah tentulah dimotori oleh Pemerintah Daerah dan didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, yang tetap sejalan dengan pembangunan Nasional. Sehingga kebijakan dalam realisasi pembangunan didaerah tidak didasari pada kepentingan kelompok atau individu semata tetapi lebih berdasarkan pada tujuan pembangun ekonomi daerah yang suda dirumuskan bersama yang berdasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih dan sesuai dengan aturan Perundang Undangan yang berlaku. Namun hal ini bisa terjadi jika seluruh elemen yang terkait dalam penetapan kebijakan pembangunan daerah bisa berpikir dan bertindak secara bijaksana dalam memproses produk kebijakan pembangunan ekonomi tersebut dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat seperti yang termuat dalam UUD RI 1945.

Perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah saat ini telah mengalami perubahan seiring dengan perubahan konstitusi Negara Republik Indonesia. Dari sistem perencana dan pengelolaan sentralisasi (*top down planning*) menjadi sistem perencana dan pengelolaan desentralisasi (*bottom up planning*). Hal ini tercermin dari Amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali yang dikuti dengan pencanangan Otonomi Daerah dengan dikeluarkannya UU RI No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, UU RI No. 25 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Namun seiring dengan tuntutan demokrasi dan perubahan konstitusi maka UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah diganti dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-undang tentang Pemerintah Daerah. Perubahan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan Otonomi Daerah, dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposiona yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional serta pembangunan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Karena pada prinsipnya kebijakan pembangunan ekonomi yang diambil oleh suatu daerah harus disesuaikan dengan kondisi dan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam serta sarana dan prasarana yang tersedia didaerah yang bersangkutan.

Hal di atas senada dengan tujuan ekonomi regional yang tidak jauh berbeda dengan tujuan ilmu eonomi pada umumnya menurut Ferguson (yang dikutip Tarigan, 2005:5) mengatakan bahwa tujuan utama kebijakan ekonomi adalah (1) *full employment*, (2) *economic growth*, dan (3) *price stability* yang masing-masing tujuan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Menciptakan *full employment* atau setidaknya-tidaknya tingkat pengangguran yang rendah menjadi tujuan pokok pemerintah pusat maupun daerah. Dalam kehidupan masyarakat, pekerjaan bukan saja berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi sekaligus juga memberikan harga diri/status bagi yang bekerja.
2. Adanya *economic growth* (pertumbuhan ekonomi), karena selain menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru, juga diharapkan dapat memperbaiki kehidupan manusia atau peningkatan pendapatan. Tanpa perubahan manusia merasa jenuh atau bahkan merasa tertinggal.
3. Terciptanya *price stability* (stabilitas harga) untuk menciptakan rasa aman/tentram dalam perasaan masyarakat. Harga yang tidak stabil membuat masyarakat merasa waswas, misalnya apakah harta atau simpanan yang diperoleh dengan kerja keras, nilai riil atau manfaat berkurang dikemudian hari.

Pada dasarnya pembangunan ekonomi tidak senantiasa terjadi dalam waktu dan atau wilayah yang bersamaan. Namun pada kenyataannya ada beberapa sektor yang mampu menggenjot untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat di suatu daerah atau

wilayah. sementara disisi lain bila kita melihat atau membandingkan dengan sektor-sektor yang lain di wilayah yang sama, dapat mengalami pertumbuhan yang lamban bahkan mengalami kemerosotan. Padahal pertumbuhan ekonomi yang pesat secara terus menerus akan memungkinkan daerah untuk dapat mamakmurkan masyarakatnya. Sekaligus sebagai realisasi pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bisa tercapai. Hal ini juga akan berpengaruh pada keberhasilan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam memimpin daerahnya. Ini merupakan tantangan bagi perkembangan pemerintahan modern saat ini, bahwa pada Negara Kesatuan maupun yang berbentuk Federasi, semakin mempercayakan urusan pemerintah kepada daerah atau negara-negara bagian, terutama mengenai urusan-urusan yang langsung menyangkut kepentingan rakyat serta yang pelaksanaannya tidak harus seragam disemua wilayah.

Selain itu dalam perkembangan demokrasi saat ini, bahwa penyerahan urusan pemerintah kepada daerah tidak lagi hanya karena berdasarkan efisiensi dan daya guna yang sifatnya teknis, tetapi telah merupakan keharusan sebagai pelaksanaan aspirasi masyarakat dalam pemerintahan demokrasi. Namun beberapa hal yang menyangkut keselamatan negara, seperti keuangan, hukum, pertahanan dan hubungan luar negeri tetap ditangani pemerintah pusat. Dalam konsep pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan. pemerintah daerah yang semakin luas dalam mengatur dan merencanakan pembangunan ekonomi khususnya dan pembangaunan pada umumnya di daerah. Termasuk kewenangan untuk menentukan arah kebijakan dan memilih alternatif cara penanganan pembangunanan di daerahnya.

Oleh karena itu sesuai dengan semangat otonomi daerah dan tuntunan perundangan undangan di Indonesia bahwa Kabupaten Morowali yang pada tahun 2005 sebagai daerah yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal sesuai Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 Tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal, yang menetapkan 199 Kabupaten yang tertinggal di Indonesia. Meskipun Kabupaten Morowali terbentuknya cukup lama namun dikarenakan beberapa hal pembentukan Kabupaten Morowali menurut Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 1999 bahwa Pasal 10 ayat 2 berbunyi Ibukota sementara ditetapkan di Kolonodaie dan selambat - lambatnya dalam jangka lima tahun bukota Kabupaten Morowal yang definitive difungsikan. Pasal 22 berbunyi Ibu Kota kabupaten Moriwali berkedudukan di Bungku dan sementara menunggu kesiapan prasarana dan sarana bagi Ibu Kota Morowali. Sehingga penempatan kedudukan Ibu Kota Kabupaten Morowali sesuai dengan UU 51 tahun 1999 tersebut, akhirnya menjadi polemik antara masyarakat yang tetap ingin mempertahankan petasia sebagai kedudukan Ibu Kota Kabupaten Morowali dan juga dipihak masyarakat yang mendukung Bungku (Kecamatan Bungku Tengah) sebagai kedudukan Ibu Kota Kabupaten Morowali. Kondisi tersebut tanpa disadari telah menghambat pembangunan di Wilayah Kabupaten Morowali. Namun dalam kondisi bagaimanapun pemerintah harus tetap memperhatikan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat karena hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai amanat undang-undang yang berlaku.

Di sisi lain, meskipun sektor basis memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kesejahteraan masyarakat lokal seringkali tidak menunjukkan peningkatan signifikan. Gap ini dapat menjadi perhatian khusus dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan pengembangan sektor basis. Tidak hanya itu, sebagian kebijakan cenderung bersifat linear, seperti insentif fiskal atau deregulasi untuk investasi, tetapi kurang mempertimbangkan pengembangan teknologi atau keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang. Kebijakan yang mendorong sektor basis di Morowali sering kali berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Oleh karena itu untuk lebih memahami akan perlunya perhatian terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan pemerintah daerah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kebijakan pengembangan sektor basis sebagai faktor pendorong pembangunan ekonomi di Kabupaten Morowali yang fokus penelitian pada tahun 2005 sampai tahun 2009 dimana Kabupaten morowali saat itu dalam keadaan transisi dari hasil pemekaran Kabupaten Poso tahun 1999 namun sampai dengan tahun 2009 masih terdapat polemik terkait

kedudukan Ibu Kota Morowali yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dan juga dihadapkan pada tantangan dikategorikan sebagai daerah tertinggal tahun 2005.

### *Konsep Pembangunan Ekonomi*

Pembangunan ekonomi adalah proses peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dalam jangka panjang yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi, sosial, dan kelembagaan (Todaro & Smith, 2015). Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut Sen (1999), pembangunan ekonomi juga berkaitan dengan perluasan kebebasan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik. Indikator pembangunan ekonomi mencakup berbagai aspek seperti:

1. Pendapatan per kapita: Mengukur output ekonomi secara agregat dan distribusinya.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Menggabungkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.
3. Distribusi Pendapatan: Menggambarkan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat.
4. Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan: Sebagai indikator kesejahteraan dan kapasitas ekonomi menciptakan lapangan kerja.

Terdapat beberapa teori Pembangunan Ekonomi diantaranya:

- a) Teori Tahapan Pertumbuhan Rostow: Rostow (1960) menjelaskan pembangunan ekonomi sebagai proses bertahap yang melibatkan lima tahap: masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas, lepas landas, menuju kedewasaan, dan konsumsi tinggi. Pembangunan sektor basis sering menjadi katalis utama pada tahap lepas landas, di mana investasi dalam sektor strategis mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b) Teori Ketergantungan: Teori ini menyatakan bahwa pembangunan ekonomi di negara berkembang sering kali terhambat oleh ketergantungan pada negara maju melalui pola perdagangan, investasi, dan teknologi (Frank, 1967). Kebijakan sektor basis bertujuan mengurangi ketergantungan ini dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal.
- c) Teori Pertumbuhan Baru (*Endogenous Growth Theory*): Menurut Romer (1990), pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh faktor internal seperti inovasi, modal manusia, dan kebijakan pemerintah. Pengembangan sektor basis, terutama melalui investasi teknologi dan pendidikan, menjadi elemen penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.

Sektor basis merujuk pada kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk pasar luar wilayah, yang kemudian menghasilkan arus masuk pendapatan ke wilayah tersebut (Blair, 1995). Dalam konteks Kabupaten Morowali, sektor basis seperti pertambangan, perikanan, dan industri pengolahan dapat:

- 1) Meningkatkan Pendapatan Daerah: Sektor basis menjadi sumber utama pendapatan regional.
- 2) Menciptakan Lapangan Kerja: Menggerakkan sektor-sektor pendukung seperti transportasi dan logistik.
- 3) Meningkatkan Infrastruktur dan Investasi: Keberadaan sektor basis sering memicu pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan listrik.

Selain itu, kebijakan pemerintah memainkan peran sentral dalam pengembangan sektor basis melalui:

- a. Penyediaan Infrastruktur: Infrastruktur yang baik meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi.
- b. Insentif Investasi: Seperti pajak rendah, kemudahan lisensi, dan zona ekonomi khusus.
- c. Diversifikasi Ekonomi: Mengurangi ketergantungan pada satu sektor basis dengan mendorong sektor lainnya.

### **Konsep Sektor Basis**

Sektor basis (*basic sector*) merupakan sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk pasar di luar wilayah lokal. Produk dari sektor ini membawa pendapatan dari luar ke dalam wilayah dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal. Teori sektor basis berakar pada teori ekonomi regional, yang pertama kali diperkenalkan oleh North (1955). Menurut teori ini:

- 1) Sektor basis mencakup kegiatan ekonomi yang melayani permintaan eksternal (*export-oriented activities*).
- 2) Sektor non-basis mencakup kegiatan ekonomi yang melayani kebutuhan lokal (*local-oriented activities*).
- 3) Perkembangan sektor basis diyakini mampu memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap sektor non-basis, sehingga memacu pembangunan wilayah secara keseluruhan.

North menyatakan bahwa pembangunan ekonomi regional sangat bergantung pada kemampuan sektor basis untuk menghasilkan surplus ekonomi dan meningkatkan aliran investasi ke wilayah tersebut.

Selanjutnya, sektor basis sering dikaitkan dengan teori lokasi oleh Weber (1929), yang menyoroti pentingnya biaya transportasi, sumber daya, dan tenaga kerja dalam menentukan lokasi industri. Sektor basis cenderung berkembang di daerah dengan keunggulan kompetitif tertentu, seperti:

- a) Ketersediaan sumber daya alam (contoh: tambang nikel di Kabupaten Morowali).
- b) Kedekatan dengan pasar atau jalur distribusi.
- c) Ketersediaan infrastruktur pendukung, seperti pelabuhan dan kawasan industri.

Keunggulan kompetitif ini menjadikan sektor basis sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui:

1. Peningkatan output dan investasi.
2. Penyediaan lapangan kerja.
3. Transfer teknologi dan peningkatan keterampilan.

Salah satu elemen kunci dari teori sektor basis adalah efek pengganda ekonomi. Efek ini terjadi ketika pendapatan yang dihasilkan oleh sektor basis mendorong permintaan di sektor-sektor lain dalam wilayah tersebut, seperti perdagangan, transportasi, dan jasa. Formula efek pengganda (*multiplier effect*) sering digunakan untuk mengukur dampak sektor basis terhadap total pendapatan wilayah. Peningkatan sektor basis dapat memperbesar pengganda ekonomi dan menghasilkan dampak positif yang meluas pada seluruh struktur ekonomi regional. Menurut Friedmann, J., & Alonso, W. (1964). Kebijakan pengembangan sektor basis mencakup langkah-langkah untuk:

1. Meningkatkan daya saing sektor basis melalui insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan pembangunan infrastruktur.
2. Diversifikasi sektor basis untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tunggal.
3. Penguatan rantai pasok lokal agar nilai tambah tetap berada di wilayah tersebut.

Di Kabupaten Morowali, sektor basis seperti pertambangan nikel memainkan peran strategis. Namun, kebijakan pengembangan sektor basis perlu diarahkan untuk mendorong keberlanjutan dan pemerataan ekonomi.

### **METODE PENELITIAN**

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei berdasarkan data sekunder. Pengumpulan data sekunder bersumber dari dokumen yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Morowali dan Provinsi Sulawesi Tengah serta dokumen yang dimiliki oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali dan Provinsi Sulawesi Tengah. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi sektor dan sub sektor-sub sektor unggulan di Kabupaten Morowali dengan

analisis *location quotien* (LQ). Input data yang digunakan pada perhitungannya adalah nilai produksi tiap sektor dan sub sektor di Kabupaten Morowali dan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan nilai pendapatan sektor dan sub sektor total.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis *Location Quotien* (LQ) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi petunjuk adanya keunggulan komparatif bagi sektor sektor yang telah lama berkembang, sedangkan bagi sektor yang baru atau sedang tumbuh apalagi yang belum pernah ada, LQ tidak dapat digunakan, karena produk totalnya belum menggambarkan kapasitas riil daerah tersebut. Melalui perkembangan LQ kita bisa melihat suatu sektor tertentu pada kurun waktu yang berbeda, apakah terjadi kenaikan atau penurunan.

Adapun hasil data yang diperoleh mengenai perkembangan LQ Kabupaten Morowali Tahun 2005 dan 2009 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1: LQ Morowali / Lapangan Usaha Kabupaten Morowali Dalam Lingkungan Propinsi Sulawesi Tengah**

Lapangan Usaha	PDRB	PDRB	PDRB	PDRB	PDRB
	2005	2006	2007	2008	2009
	LQ	LQ	LQ	LQ	LQ
<b>1 Pertanian</b>	<b>1,25</b>	<b>1,14</b>	<b>1,04</b>	<b>0,99</b>	<b>10,44</b>
1. Tanaman Bahan Makanan	0,54	0,48	0,42	0,38	0,37
2. Tanaman Perkebunan	1,91	1,76	1,63	1,73	1,75
3. Peternakan	0,61	0,53	0,46	0,45	0,41
4. Kehutanan	1,52	1,45	1,37	1,31	1,24
5. Perikanan	0,61	1,04	0,94	0,96	0,95
<b>2 Pertambangan &amp; Penggalian</b>	<b>2,35</b>	<b>4,82</b>	<b>5,91</b>	<b>5,03</b>	<b>5,6</b>
1. Pertambangan Minyak & Gas Bumi	12,38	11,15	10,6	10,44	10,01
2. Pertambangan Non Migas	-	-	-	-	-
3. Penggalian	0,3	0,27	0,26	0,24	0,21
<b>3 Industri Pengolahan</b>	<b>0,52</b>	<b>0,48</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,38</b>
1. Makanan Minuman & Tembakau	0,35	0,33	0,31	0,3	0,3
2. Tekstil, Barang dari kulit dan alas kaki	0,33	0,29	0,28	0,22	0,21
3. Kayu dan hasil hutan lainnya	0,65	0,6	0,58	0,47	0,45
4. Kertas dan barang cetakan	0,37	0,33	0,31	0,26	0,23
5. Pupuk, Kimia dan barang dari karet	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
6. Semen dan barang galian bukan logam	0,34	0,31	0,3	0,22	0,2
7. Alat angkutan, Mesin dan peralatannya	0,41	0,35	0,34	0,26	0,22
8. Barang lainnya	0,29	0,26	0,26	0,17	0,16
<b>4 Listrik dan Air Bersih</b>	<b>0,71</b>	<b>0,64</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>	<b>6,02</b>
1. Listrik	0,71	0,65	0,63	0,64	0,62
2. Air bersih	0,68	0,6	0,56	0,5	0,46
<b>5 Bangunan</b>	<b>0,49</b>	<b>0,42</b>	<b>0,39</b>	<b>0,38</b>	<b>0,36</b>
<b>6 Perdagangan, Hotel, &amp; Restoran</b>	<b>1,21</b>	<b>1,13</b>	<b>1,06</b>	<b>1</b>	<b>0,99</b>
1. Perdagangan Besar	1,21	1,13	1,07	0,1	0,99
2. Hotel	0,45	0,4	0,46	0,11	0,35
3. Restoran	1,37	1,23	1,21	0,06	1,13

<b>7</b>	<b>Pengangkutan dan Komunikasi</b>	<b>0,14</b>	<b>0,12</b>	<b>0,11</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	1. Angkutan	0,14	0,12	0,11	0,1	0,1
	1. Angkutan jalan raya	0,16	0,13	0,12	0,11	0,11
	2. Angkutan laut	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06
	3. Angkutan Sungai, Danau, & Penyeberangan	-	-	-	-	-
	4. Angkutan Udara	-	-	-	-	-
	5. Jasa penunjang angkutan	0,21	0,18	0,15	0,14	0,12
	2. Komunikasi	0,15	0,13	0,13	0,1	0,1
	<b>Keuangan, Persewaan, &amp; Jasa Perusahaan</b>					
<b>8</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>1,02</b>	<b>0,86</b>	<b>0,79</b>	<b>0,77</b>	<b>0,75</b>
	1. Bank	0,86	0,69	0,66	0,67	0,68
	2. Lembaga keuangan tanpa bank	0,36	0,3	0,27	0,25	0,23
	3. Sewa Bangunan	1,81	1,61	1,45	1,39	1,33
	4. Jasa Perusahaan	0,21	0,18	0,17	0,17	0,16
<b>9</b>	<b>Jasa-jasa</b>	<b>0,7</b>	<b>0,66</b>	<b>0,59</b>	<b>0,53</b>	<b>0,49</b>
	1. Pemerintahan Umum	0,72	0,69	0,62	0,57	0,52
	2. Swasta	0,68	0,59	0,52	0,46	0,44
	1. Sosial Kemasyarakatan	0,87	0,74	0,67	0,64	0,6
	2. Hiburan & Rekreasi	0,15	0,13	0,13	0,11	0,1
	3. Perorangan & Rumah Tangga	0,61	0,53	0,47	0,40	0,39

Data diolah berdasarkan PDRB Provinsi Sulawesi Tengah dan PDRB Kabupaten Morowali

Untuk mendapatkan sektor/sub sektor mana saja yang akan menjadi sektor/sub sektor basis, yang kemudian akan dijadikan acuan dalam perencanaan kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Morowali. Maka penulis berpedoman pada beberapa indikator terhadap Sektor/sub sektor yang potensial untuk dikembangkan adalah sebagai berikut :

- 1) Sektor/sub sektor yang memiliki nilai ekonomis yang relative tinggi.
- 2) Sektor/sub sektor yang memiliki ketersediaan sumber daya yang relative besar.
- 3) Sektor/sub sektor yang memiliki peluang investasi yang relative besar.
- 4) Sektor/sub sektor yang mampu dikelola secara efektif dan efisien oleh pemerintah Kabupaten Morowali.
- 5) Sektor/sub sektor yang mampu menyerap tenaga kerja lokal yang relative besar.
- 6) Sektor/sub sektor yang dapat memberikan manfaat terbesar terhadap kemakmuran masyarakat.

Indikator-indikator tersebut diatas ditetapkan dengan beberapa pertimbangan bahwa kondisi saat ini Kabupaten Morowali, masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dan keterbatasan pembiayaan/dana dan teknologi.

Dilihat dari nilai LQ terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Morowali periode 2005 sampai dengan tahun 2009, maka terdapat 8 (delapan) sektor/Sub sektor yang menjadi sektor basis yang dapat diandalkan untuk menunjang PDRB Kabupaten Morowali kedepan, apabila diklasifikasikan menurut lamanya sektor/sub sektor menjadi basis perekonomian di Kabupaten Morowali. Pada sektor pertanian ada dua sektor yang menjadi setor basis secara terus menerus selama lima tahun yakni sub sektor tanaman perkebunan dan sub sektor kehutanan. Sementara untuk sektor perikanan walaupun hanya tahun 2006 menjadi sektor basis dan pada tahun 2007 menurun dibanding tahun 2006, tapi ketika dibandingkan tahun 2005 masih tergolong meningkat yakni antara tahun 2007 dan 2008 cenderung naik dari 0,94 meningkat 0,96 dan ditahun 2009 bertahan pada 0.96.

Sementara itu pada sektor pertambangan dan penggalian secara terus menerus selama lima tahun menjadi sektor basis yakni pada tahun 2005 mencapai 2,35 dan pada tahun 2006 terus meningkat 4.82. Di tahun 2007 meningkat menjadi 5,91 walaupun pada tahun 2009 menurun menjadi 5,60. Pencapaian LQ yang tertinggi pada sektor ini dibanding pada sektor - sktor yang lain didukung oleh sub sektor pertambangan minyak dan gas bumi dengan LQ yang paling tinggi dibanding sub sektor yang lain walaupun selama lima tahun terakhir cenderung menurun yakni pada tahun 2005 mencapai 12,38, pada tahun 2006 turun menjadi 11.15 Demikian pada tahun 2007 menurun 10,60 hingga tahun 2008 menjadi 10.44 dan tahun 2009 menurun hingga 10,01.

**Tabel 2: Analisis Pertimbangan Prioritas Sektor Basis Perekonomian Kabupaten Morowali Terhadap Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah**

No	Sektor Basis	Indikator Penilaian						Total Nilai	Jumlah Tahun Basis	Total Nilai Prioritas (8x9)
		Ketersediaan Sumber Daya	Nilai Ekonomis	Kemampuan Pengelolaan	Penyerapan Tenaga Kerja	Peluang Investasi	Manfaat Bagi Masyarakat			
1	Pertanian	3	3	3	4	3	4	20	4	80
2	Perkebunan	5	5	4	4	4	5	27	5	135
3	Kehutanan	4	4	3	2	2	4	19	5	95
4	Perikanan	4	3	2	3	3	5	20	1	20
5	Pertambangan	5	4	4	4	5	5	27	5	135
6	Perdagangan	2	3	3	3	3	4	18	3	54
7	Restoran	2	3	3	2	2	2	14	4	56
8	Sewa Bangunan	3	3	3	2	3	3	17	5	85

Dari hasil analisis LQ tersebut di atas untuk realisasinya dapat kita berpedoman pada beberapa pandangan Tarigan, (2005) bahwa tujuan kebijakan ekonomi adalah menciptakan kemakmuran. Salah satu ukuran kemakmuran terpenting adalah pendapatan. Kemakmuran tercipta karena ada kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Lebih lanjut menurut Tarigan (2005) bahwa langkah - langkah kebijakan umum pengembangan wilayah yang bisa ditempuh oleh seorang kepala daerah/perencana pembangunan daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di daerahnya, yang secara umum berarti meningkatkan perekonomian daerah tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Sejalan dengan teori basis ekspor, perlu didorong pertumbuhan dari sektor - sektor yang hasil produksinya dapat dijual keluar daerah atau mendatangkan uang dari luar daerah, terutama ekspor luar negeri. Apabila daerah lain juga menghasilkan produk yang sama. daerah itu harus mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik atau minimal sama tetapi dengan harga pokok yang lebih rendah (efisien), termasuk pemberian jasa yang bisa mendatangkan pelanggan/uang dari luar daerah, misalnya pariwisata.
- b) Pemilihan jalur cepat dan mensinergikan perekonomian wilayah pemerintah daerah perlu menentukan sektor dan komoditi apa saja yang diperkirakan bisa tumbuh cepat di wilayah tersebut. Sektor dan komoditi itu haruslah basis atau punya prospek untuk dipasarkan ke luar wilayah atau diekspor dimasa yang akan datang dan dapat dikembangkan secara besar-besaran atau volume produksinya memenuhi syarat untuk diekspor.
- c) Pertumbuhan ekonomi bersumber dari tiga hal, yaitu investasi, perbaikan metode kerja, dan peningkatan aktivitas kerja. Kegiatan investasi dapat berupa investasi untuk kegiatan baru ataupun perluasan dari usaha-usaha yang telah ada. Hal ini sekaligus akan menambah lapangan kerja. Perbaikan metode kerja adalah usaha-usaha yang membuat faktor-faktor produksi yang sama atau bernilai sama mampu meningkatkan produksi secara inovasi. Kegiatan ini tidak sekaligus menambah lapangan kerja, tetapi kebutuhan tenaga kerja



meningkat pada putaran berikutnya. Peningkatan jam kerja akan menaikkan produksi tanpa menambah biaya.

- d) Pada dasarnya pengembangan perekonomian, baik nasional maupun regional banyak ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang mengambil peran dalam gerak perekonomian. Pada dasarnya kegiatan ekonomi disuatu wilayah dikelompokkan atas dua kegiatan yakni kegiatan basis dengan non basis. Dan hanya kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

## KESIMPULAN

Perekonomian Kabupaten Morowali mempunyai sektor basis (memiliki keunggulan komparatif) pada 8 sektor/sub sektor. Sektor basis yang paling potensial adalah sektor/sub sektor yang berada pada sektor primer, sektor pertanian yang terspesialisasi pada sub sektor, perkebunan, kehutanan, perikanan dan sektor pertambangan/penggalian yang terspesialisasi pada sub sektor pertambangan migas dan gas bumi karena memiliki nilai LQ relatif tinggi walaupun dalam lima tahun terakhir terus menurun yakni pada tahun 2005 LQ mencapai 12,38 - pada tahun 2009 turun menjadi 10,01. Dari hasil pertimbangan prioritas sektor basis melalui LQ, maka sektor basis pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan pertambangan direkomendasikan untuk mendapat prioritas utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Morowali. Berdasarkan analisa kebijakan, maka strategi pembangunan ekonomi Kabupaten Morowali, sebagai berikut: Memanfaatkan pangsa pasar komoditas pertanian khususnya perkebunan dan perikanan melalui jaringan kerja sama antar pemerintah daerah, swasta, LSM dan masyarakat baik pada tatanan lokal, regional, nasional maupun internasional di bidang ekonomi dan perdagangan dalam rangka meningkatkan produksi, produktivitas dan volume ekspor. Meningkatkan pemanfaatan lahan yang masih tersedia luas bagi pengembangan sektor pertanian melalui pengembangan system administrasi, organisasi dan manajemen pemerintahan dan pembangunan. Melakukan riset dan eksplorasi bagi pengembangan sektor pertambangan/penggalian.

## Daftar Pustaka

- Blair, J. P. (1995). *Local Economic Development: Analysis and Practice*. SAGE Publications.
- Fujita, M., Krugman, P., & Venables, A. J. (1999). *The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade*. MIT Press.
- Frank, A. G. (1967). *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*. Monthly Review Press.
- Friedmann, J., & Alonso, W. (1964). *Regional Development and Planning*. MIT Press.
- Hoover, E. M., & Giarratani, F. (1984). *An Introduction to Regional Economics*. Knopf.
- Isard, W. (1956). *Location and Space Economy*. MIT Press
- North, D. C. (1955). *Location Theory and Regional Economic Growth*. Journal of Political Economy, 63(3), 243-258
- Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 07/PER/M-PDT/I11/2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Perubahan Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press
- Richardson, H. W. (1972). *Input-Output and Regional Economics*. Wiley
- Romer, P. M. (1990). *Endogenous Technological Change*. Journal of Political Economy, 98(5), S71-S102.
- Rostow, W. W. (1960). *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge University Press
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Tarigan, Robinson. (2005). *Ekonomi Regional. Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development*. Pearson Education.

Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan

Weber, A. (1929). *Theory of the Location of Industries*. University of Chicago Press